



## BAB STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

# 6

### 6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Proses perumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan juga diwarnai dengan menelaah agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar periode 2016-2021 juga memperhatikan kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Beberapa hal yang menjadi **agenda prioritas (AP)** Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, yaitu:

1. Penataan perkotaan Kanigoro

Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas penunjang di Kanigoro untuk penataan Kota Kanigoro sebagai pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Blitar. Untuk pemenuhan kriteria ibukota kabupaten selain kantor sekretariat yang sudah ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Blitar akan menambahkan sarana lain diantaranya perkantoran pemerintah daerah, kantor layanan publik, dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, di kawasan ini juga akan dilakukan pengembangan Pasar Kanigoro dan pembangunan *Spot Center* di Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro, penataan trotoar serta pembangunan sarana pendukung perkotaan lainnya.

2. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah gerakan yang bernama "Gerbangkawentar". Gerbang kawentar merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Blitar.

Jika dilihat *trend* data kemiskinan Kabupaten Blitar pada enam (6) tahun belakangan ini, cenderung mengalami penurunan. Jika Tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 12,13%, pada akhir



Tahun 2015 turun menjadi sebesar 9,97%. Atau terjadi penurunan sebesar 2,16 poin. Angka penurunan ini relatif lebih cepat diantara daerah lain di Jawa Timur. Bahkan menurut data sementara BPS, angka penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu yang sama hanya sebesar 1,93 poin. Target penurunan kemiskinan ini tidak lepas dari program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Sejalan dengan upaya penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Blitar sebesar 3,74%, turun menjadi 3,08% pada Tahun 2014 dan turun lagi pada Tahun 2015 menjadi 2,79% dan pada Tahun 2016 sebesar 2,73% atau mengalami penurunan 0,04%.

### 3. Pengembangan pariwisata dan kawasan perdesaan

Kabupaten Blitar sangat kaya akan potensi keindahan alamnya yang dapat dijadikan obyek wisata. Salah satu tempat wisata di Kabupaten Blitar adalah Candi Penataran, dan sampai sekarang telah tercatat ada 40 destinasi tempat wisata baik wisata alam seperti pantai, wisata gua, candi, maupun wisata edukasi seperti kampung coklat.

Pada Tahun 2016 telah dilakukan penambahan destinasi dengan terbentuknya desa wisata yang tersebar di Kabupaten Blitar dengan obyek yang ditawarkan antara lain wisata ekologis, wisata *adventure* dan wisata kuliner. Desa desa wisata tersebut antara lain, Desa Wisata Semen Kecamatan Gandusari (Kampung Wisata Ekologis), Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Gandusari (Wisata Adventure Gunung Kelud), Desa Wisata Soso Kecamatan Gandusari (Wisata Tirta Waduk Nyunyur), Desa Wisata Krisik Kecamatan Gandusari (Wisata Alam dan Budaya Rambut Monte), Desa Wisata Tlogo Kecamatan kanigoro (Wisata Agropolitan). Kemudian, Desa Wisata Plosorejo Kecamatan Kademangan (Wisata Kampung Coklat), Desa Wisata Rejowinangun Kecamatan Kademangan (Wisata Aneka Olahan Makanan), Desa Wisata Penataran Kecamatan Nglegok (Wisata Budaya Candi Penataran), Desa Wisata Siraman Kecamatan Kesamben (Wisata Kuliner Olahan Siput), Desa Wisata Serang Kecamatan Panggungrejo (Ekowisata Penangkaran Penyus), Desa Wisata Jaten Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan (Kampung Ekologis), Desa Wisata Plumbangan Kecamatan Doko (Adventure Ngarai Genjong). Untuk memperkuat keberadaan desa-



desa wisata tersebut akan dilakukan proses regulasi tentang penetapan desa tersebut menjadi desa wisata.

Lebih lanjut, salah satu agenda prioritas dalam pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 yaitu pengembangan kawasan perdesaan. Desa tertinggal tahun 2015 sebanyak 50 desa dan masih tetap jumlahnya pada tahun 2016. Selaras dengan peningkatan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), kegiatan pembangunan pada awalnya difokuskan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan di lokasi desa tertinggal dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya seluruh desa di Kabupaten Blitar akan menjadi desa maju atau sangat maju.

#### 4. Pengembangan dan pengolahan produk pertanian

Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi salahsatu agenda pembangunan Kabupaten Blitar yaitu peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan.

Upaya pengembangan produksi dan pengolahan produk pertanian dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Hasil pembangunan pertanian tanaman pangan antara lain peningkatan produksi padi; pada tahun 2015 sebesar 323.549 ton dan pada tahun 2016 sebesar 370.781 ton atau naik 0,87%. Keberhasilan kenaikan produksi padi ini antara lain disebabkan, adanya bantuan benih unggul, subsidi harga pupuk, bantuan alat-alat pertanian. Produksi perkebunan, tanaman semusim misalnya, tembakau juga mengalami peningkatan produksi. Tanaman tebu pada tahun 2015 sebesar 567.786,62 ton, naik pada tahun 2016 menjadi 568.894,00 ton atau naik sebesar 0,1%. Sementara tanaman tahunan antara lain kopi, kenangan, cengkeh, kakao dan kelapa juga mengalami kenaikan produksi rata-rata antara 0,1-0,2 %.

Dalam bidang peternakan, produksi daging, telur dan susu juga mengalami peningkatan produksi. Produksi susu tahun 2015 sebesar 32.493 ton, naik menjadi 34.117 ton pada tahun 2016 atau ada kenaikan sebesar 1,04%. Produksi daging pada tahun 2015 sebesar 60.628 ton menjadi 61.021 ton pada tahun 2016 atau ada kenaikan sebesar 1,06%; sedangkan produksi telur pada tahun 2015 sebesar 159.154 ton naik menjadi 161.835 ton pada tahun 2016 atau naik sebesar 1,01%.

Kinerja pembangunan bidang perikanan dan kelautan cukup menggembirakan walaupun hasil laut menurun namun untuk pembudidayaan ikan air tawar seperti ikan koi naik secara



drastis sehingga nilai jual mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hasil tangkapan ikan sebesar 2.226,45 ton dengan nilai Rp 21.297.411,00 (21 milyar 297 juta 411 ribu rupiah), mengalami penurunan pada tahun 2016 yakni hanya sebesar 899,40 ton dengan nilai Rp 11.625.387.000 (11 milyar 625 juta 387 ribu rupiah). Sementara untuk budidaya ikan pada tahun 2015 sebesar 14.642,26 ton dengan nilai Rp 261.454.145.000 (261 milyar 454 juta 145 ribu rupiah), naik menjadi 16.300,80 ton dengan nilai Rp 282.943.920.000 (282 milyar 454 juta 145 ribu rupiah) pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 1,11%.

Meskipun hasil produksi terutama tangkapan mengalami penurunan namun secara umum budidaya ikan, baik ikan laut maupun air tawar memiliki nilai penjualan yang meningkat. Pada tahun 2015 nilai penjualan budidaya ikan sebesar Rp. 682.764.951.000 (682 milyar 764 juta 951 ribu rupiah) naik menjadi Rp. 1.134.036.008.000 (1 triliun 134 milyar 036 juta 008 ribu rupiah) pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 89%. Besaran omset tersebut ditopang dengan tingginya produksi ikan koi pada tahun 2016 yang mencapai Rp. 556.597.500.000 (556 milyar 597 juta 500 ribu rupiah).

#### 5. Pengembangan daya saing UMKM

Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, temu bisnis ritail modern dan koperasi UMKM. Untuk pengembangannya telah diberikan fasilitas permodalan melalui bank dengan bunga murah, konsultasi bisnis, pelayanan klinik UMKM. Pada Tahun 2015 jumlah usaha mikro sebanyak 254.187, mengalami peningkatan Tahun 2016 menjadi 255.662 atau naik sebanyak 1.484.

#### 6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Saat ini di Kabupaten Blitar telah memiliki RSUD Ngudi Waluyo di Kecamatan Wlingi yang secara lokasi berada di wilayah Kabupaten Blitar sebelah timur. Berdasarkan jarak tempuh keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa masih kurang efektif dalam melayani masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Blitar sebelah barat. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar, khususnya di wilayah Barat, maka Pemerintah Kabupaten Blitar akan membangun RSUD di Kecamatan Srengat. Pembangunan RSUD ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan terjangkau.



Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.**

**a. Strategi Kesatu,** Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

**Arah Kebijakan:**

- (1) Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausaha baru
- (3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja

**b. Strategi Kedua,** Meningkatkan pembinaan bagi PMKS.

**Arah Kebijakan:** Penerapan mekanisme bantuan dan pembinaan PMKS serta pemberdayaan PSKS yang terpadu.

**c. Strategi Ketiga,** Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.

**Arah Kebijakan:** Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

**d. Strategi Keempat,** Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**Arah Kebijakan:** Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM.

**e. Strategi Kelima,** Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan.

**Arah Kebijakan:** Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja	a. Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha b. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausaha baru c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja	2018-2021



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
		2. Meningkatkan pembinaan bagi PMKS	Penerapan mekanisme bantuan dan pembinaan PMKS serta pemberdayaan PSKS yang terpadu	
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	2017-2021
		4. Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM	
		5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan	Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.	

**Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum.**

**a. Strategi Kesatu,** Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

**b. Strategi Kedua,** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan masyarakat.

**c. Strategi Ketiga,** Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.



**Tabel 6.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Terwujudnya stabilitas wilayah	1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	2017, 2018, 2021
		2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan	Peningkatan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan masyarakat	
		3. Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	

**Misi III: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

a. **Strategi Kesatu**, Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.

**Arah Kebijakan:** Jaminan akses terhadap layanan pendidikan.

b. **Strategi Kedua**, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik.

c. **Strategi Ketiga**, Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan.

d. **Strategi Keempat**, Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan.

e. **Strategi Kelima**, Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat.

f. **Strategi Keenam**, Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Arah Kebijakan:**

(1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.



- (2) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
- (3) Peningkatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga.

**Tabel 6.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-3**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	a. Jaminan akses terhadap layanan pendidikan b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga	2018-2021
		2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik	
2	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan	2018-2021
		4. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan	
		5. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat	Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat	
3	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	6. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan b. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	2019-2021





**Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**

**a. Strategi Kesatu,** Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan.

**b. Strategi Kedua,** Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal.

**Arah kebijakan:** Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah.

**c. Strategi Ketiga,** Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

**d. Strategi Keempat,** Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.

**Arah Kebijakan:** Penataan struktur kelembagaan daerah sesuai kebutuhan daerah.

**e. Strategi Kelima,** Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

**Arah Kebijakan:**

(1) Menerapkan pembinaan kinerja aparatur.

(2) Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

**f. Strategi Keenam,** Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

**Arah kebijakan:** Peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD.

**Tabel 6.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel	Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan	2017, 2019-2021



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
		2. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal	Peningkatan kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	
		4. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien	Penataan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan daerah	
		5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	a. Menerapkan pembinaan kinerja aparatur b. Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6. Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien	Peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD	2017, 2019- 2021

**Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing**

**a. Strategi Kesatu,** Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro.

**Arah kebijakan:**

- (1) Peningkatan kualitas produk koperasi dan usaha mikro.
- (2) Peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian masyarakat.

**b. Strategi Kedua,** Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial.

**Arah Kebijakan:**

- (1) Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
- (2) Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah.



**c. Strategi Ketiga,** Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian.

**Arah Kebijakan:**

- (1) Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas.
- (2) Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.

**d. Strategi Keempat,** Mengoptimalkan destinasi pariwisata.

**Arah Kebijakan:**

- (1) Optimalisasi destinasi wisata dengan prioritas Kawasan Candi Penataran, Sirahkencong dan Pantai Serang.
- (2) Pengembangan sektor penunjang kepariwisataan, desa wisata, dan pemanfaatan budaya.

**e. Strategi Kelima,** Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan.

**Arah kebijakan:** Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan.

**f. Strategi Keenam,** Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan.

**g. Strategi Ketujuh,** Meningkatkan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan hidup.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup.

**Tabel 6.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro	a. Peningkatan kualitas produk koperasi dan usaha mikro. b. Peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian masyarakat	2017-2021
		2. Mengembangkan sektor perdagangan dan industri kecil menengah, serta	a. Peningkatan jumlah usaha perdagangan b. Peningkatan	



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
		sentra industri potensial	jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial	
		3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian	a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas b. Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.	
		4. Mengoptimalkan destinasi pariwisata	a. Optimalisasi destinasi wisata dengan prioritas Kawasan Candi Penataran, Sirahkencong dan Pantai Serang. b. Pengembangan sektor penunjang kepariwisataan, desa wisata, dan pemanfaatan budaya	
2	Meningkatnya pelayanan perijinan	5. Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan	Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan	2017, 2019-2021
3	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	6. Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan	Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan	2018-2019, 2021
		7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan hidup	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup	

**Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan**

**a. Strategi Kesatu,** Memperkuat kelembagaan pemerintah desa.

**Arah Kebijakan:**

(1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.



(2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.

**b. Strategi Kedua,** Mengembangkan kawasan perdesaan.

**Arah Kebijakan:** Pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.

**c. Strategi Ketiga,** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

**Arah Kebijakan:** Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

**Tabel 6.6**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-6**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Memperkuat kelembagaan pemerintah desa	a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	2017-2019, 2021
		2. Mengembangkan kawasan perdesaan	Pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal	
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

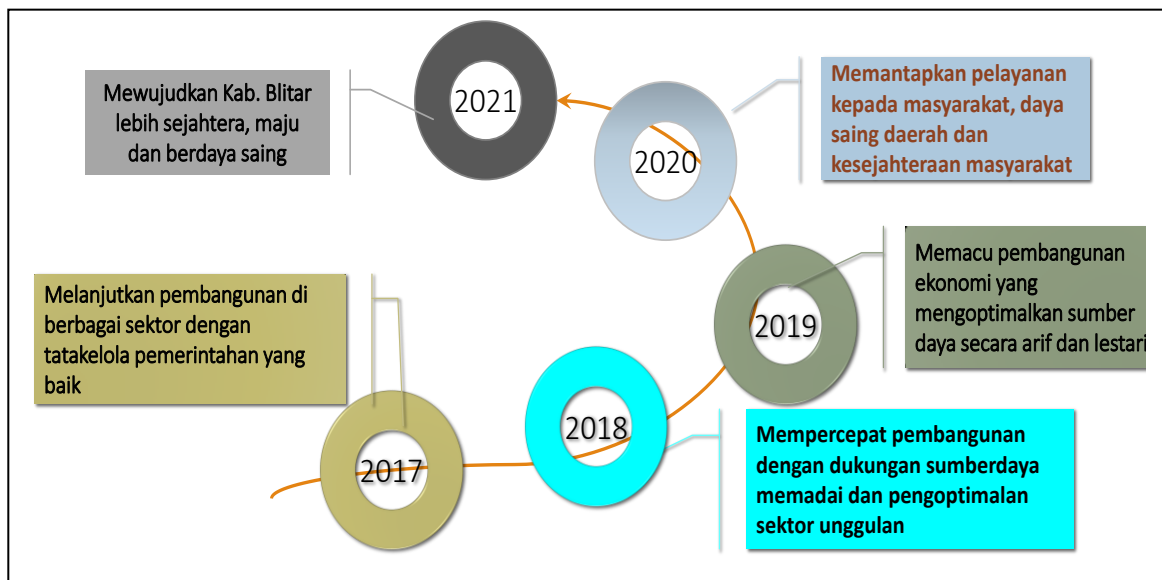
Arah kebijakan pembangunan merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan upaya menjawab isu strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan yang telah dijabarkan berdasarkan strategi sebagaimana dimuat pada subbab sebelumnya, memberikan gambaran mengenai fokus pembangunan per tahun.

Selama 5 (lima) tahun, pembangunan diarahkan untuk mencapai seluruh sasaran pembangunan jangka menengah secara bertahap. Penetapan fokus pembangunan per tahun yang menekankan ke beberapa aspek atau urusan, bukan berarti menghilangkan atau tidak melaksanakan sama sekali aspek atau urusan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan Kabupaten Blitar. Arah kebijakan pada penekanan prioritas per tahun mengindikasikan hal-hal yang menjadi focus pembangunan setiap tahun, bersama-sama dengan penyelenggaraan urusan/fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah lainnya.

**Gambar 6.1**

**Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar  
Tahun 2017 sampai dengan 2021**



Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah disajikan diatas, selanjutnya dipetakan per tahun untuk memberi kerangka pembangunan tahunan menuju pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan tahunan memberikan panduan tentang urutan pelaksanaan masing-masing strategi sehingga membentuk suatu keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap tahapan tahun menunjukkan strategi mana yang menjadi fokus atau prioritas pada tahun tersebut, dengan tetap memperhatikan, mempersiapkan, ataupun memantapkan pelaksanaan strategi yang lain yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tahun keempat dan tahun kelima merupakan tahun untuk memacud dan memantapkan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.



### **6.2.1. Arah Kebijakan Tahun 2017**

Pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran melalui strategi dan arah kebijakan yang merupakan tumpuan awal dalam pembangunan empat tahun berikutnya dalam pencapaian visi dan misi. Sasaran yang menjadi fokus tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah:

- a. Sasaran 2 (S2) yaitu Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.
- b. Sasaran 3 (S3) yaitu Terwujudnya stabilitas wilayah.
- c. Sasaran 7 (S7) yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- d. Sasaran 8 (S8) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- e. Sasaran 9 (S9) yaitu Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata.
- f. Sasaran 10 (S10) yaitu Meningkatnya pelayanan perijinan.
- g. Sasaran 12 (S12) yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

### **6.2.2. Arah Kebijakan Tahun 2018**

Pembangunan Tahun 2018 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, fokus pembangunan diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya:

- a. Sasaran 1 (S1) yaitu Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Sasaran 2 (S2) yaitu Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.
- c. Sasaran 3 (S3) yaitu Terwujudnya stabilitas wilayah.
- d. Sasaran 4 (S4) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
- e. Sasaran 5 (S5) yaitu Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Sasaran 9 (S9) yaitu Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata.
- g. Sasaran 11 (S11) yaitu Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
- h. Sasaran 12 (S12) yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan desa.



### **6.2.3. Arah Kebijakan Tahun 2019**

Selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan Tahun 2019 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama dan kedua. Sasaran yang menjadi fokus pada tahun ketiga RPJMD 2016-2021 adalah:

- a. Sasaran 1 (S1) yaitu Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Sasaran 2 (S2) yaitu Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.
- c. Sasaran 4 (S4) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
- d. Sasaran 5 (S5) yaitu Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Sasaran 6 (S6) yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
- f. Sasaran 7 (S7) yaitu Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- g. Sasaran 8 (S8) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- h. Sasaran 9 (S9) yaitu Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata.
- i. Sasaran 10 (S10) yaitu Meningkatkan pelayanan perijinan.
- j. Sasaran 11 (S11) yaitu Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
- k. Sasaran 12 (S12) yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan desa.

### **6.2.4. Arah Kebijakan Tahun 2020**

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2020 adalah pemantapan dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017-2019 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi pembangunan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan. Tahun 2020 diarahkan untuk memantapkan pembangunan di berbagai sektor terutama melanjutkan sasaran 1 (S1) yaitu meningkatkan penanganan kemiskinan dan pengangguran dan sasaran 9 (S9) yaitu Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata. Upaya ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, pemberian pelayanan publik dan pelayanan perijinan yang semakin baik.





#### **6.2.5. Arah Kebijakan Tahun 2021**

Pembangunan selama beberapa tahun terakhir telah menyentuh berbagai aspek kehidupan dan sektor yang berdaya ungkit untuk mewujudkan masyarakat Blitar yang sejahtera, maju dan berdaya saing. Pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk melanjutkan pencapaian target-target pembangunan yang belum optimal guna mencapai visi dan misi pembangunan.